

TRADISI *MAPAG RAMADHAN* DI KABUPATEN CIAMIS DALAM PERSPEKTIF PARTICIPATIVE GOVERNANCE

Candra Firmanto¹, Dini Yuliani²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2}

Email; candrafirmanto@unigal.ac.id¹,
diniasyari16@unigal.ac.id²

ABSTRAK

Tradisi Mapag Ramadhan merupakan bagian dari kearifan lokal di Kabupaten Ciamis yang tetap lestari hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Penelitian ini menganalisis tradisi Mapag Ramadhan dalam perspektif participative governance, yang menekankan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan tradisi ini. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta partisipasi masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan tradisi Mapag Ramadhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ini mencerminkan prinsip participative governance melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, serta peningkatan kohesi sosial. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tradisi ini menunjukkan bahwa budaya partisipatif telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan kesinambungan tradisi ini di tengah arus modernisasi.

Kata kunci: Kearifan lokal, Mapag Ramadhan, partisipasi masyarakat, *participative governance*

ABSTRACT

The Mapag Ramadhan tradition is part of local wisdom in Ciamis Regency that has survived until now. This tradition not only has religious value, but also becomes a forum for social interaction in welcoming the holy month of Ramadhan. This study analyzes the Mapag Ramadhan tradition from a participative governance perspective, which emphasizes the active involvement of various stakeholders in the process of organizing this tradition. Using a descriptive qualitative method, this study explores the role of local government, community leaders, religious organizations, and community participation in maintaining and developing the Mapag Ramadhan tradition. The results of the study show that the implementation of this tradition reflects the principle of participative governance through collaboration between the government and the community in preserving culture, strengthening local identity, and

increasing social cohesion. In addition, the involvement of various parties in the planning, implementation, and evaluation of this tradition shows that participatory culture has become part of local governance. Therefore, stronger policy support is needed to ensure the continuity of this tradition amidst the flow of modernization.

Keywords: *Local wisdom, Mapag Ramadhan, community participation, participative governance*

PENDAHULUAN

Modal sosial dan tradisi lokal merupakan dua elemen yang saling berkaitan dalam membangun kohesi sosial serta memperkuat struktur masyarakat. Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama (Fadli, 2020; Syafar, 2017). Sedangkan tradisi lokal mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi identitas kolektif suatu komunitas (Da Silva et al., 2024; Jessen et al., 2022).

Dalam konteks masyarakat, tradisi lokal berfungsi sebagai mekanisme yang mempererat hubungan sosial, membangun rasa kebersamaan, serta menumbuhkan solidaritas antarwarga. Tradisi seperti gotong royong, upacara adat, atau perayaan keagamaan tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya. Tetapi juga memperkuat modal sosial dengan meningkatkan partisipasi dan interaksi antarindividu.

Tradisi dan kearifan lokal juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dorongsihae et al., 2022). Terutama dalam membangun partisipasi

masyarakat, memperkuat identitas kolektif, serta meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Pemerintahan merupakan salah satu struktur utama dalam masyarakat yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan berbagai aspek kehidupan publik. Peran ini dijalankan melalui kebijakan, regulasi, serta mekanisme partisipasi yang melibatkan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Kabupaten Ciamis memiliki berbagai tradisi unik, termasuk dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan (Hidayat, 2020; Suryani & Fahmi, 2021; Wijayanti & Wulan, 2019). Tradisi *Mapag Ramadhan* merupakan salah satu kearifan lokal yang masih dilestarikan di Kabupaten Ciamis, sebagai bentuk penyambutan bulan suci Ramadhan. Tradisi ini biasanya dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan dan budaya, seperti doa bersama, ziarah kubur, pengajian, serta kerja bakti membersihkan lingkungan dan tempat ibadah.

Tradisi *Mapag Ramadhan* juga menjadi salah satu upaya dalam melestarikan kebudayaan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Salah satu kegiatan utamanya adalah “nyekar”, yaitu berziarah ke makam-makam leluhur. Dalam agenda pemerintah Kabupaten Ciamis, tercatat ada sembilan kegiatan “nyekar” yang memiliki istilah berbeda, seperti Nyepuh, Ngikis, Misalin, Merlawu, dan Nadran (Disbudpora Kab. Ciamis, 2025). Kegiatan ini bukan hanya menunjukkan rasa hormat kepada leluhur, tetapi juga mempererat ikatan sosial dan memperkuat kebudayaan lokal yang menjadi bagian penting dari identitasnya.

Sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat, Ciamis memiliki sejarah pemerintahan yang panjang. Dahulu, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Galuh, kerajaan bercorak Hindu yang berkuasa di tatar Sunda sebelum era kolonialisme (Fauzi & Hasan, 2024; Shanti et al., 2022; Sofianto & Falah, 2020). Hingga kini, nama “Galuh” masih melekat dalam identitas Ciamis, tercermin dalam budaya dan sejarahnya (Lubis dkk., 2013).

Berbagai tradisi dan kesenian khas tetap dilestarikan, mencerminkan identitas budaya yang kuat. Kehidupan sosial juga dipengaruhi oleh aspek religius, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Pesantren dan majelis taklim menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Perpaduan antara budaya lokal dan nilai-nilai agama membentuk karakter masyarakat Ciamis yang religius, berpegang teguh pada adat istiadat, serta memiliki solidaritas sosial yang tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk pelestarian budaya dan tradisi lokal, menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong, memfasilitasi, dan mengakui keterlibatan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya yang memperkuat identitas lokal.

Pemerintahan yang mengakomodasi kearifan lokal dalam tata kelolanya cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam menjalankan program pembangunan (Affan, 2021; Widodo, 2021). Keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga dan mengembangkan tradisi lokal tidak hanya membangun kepercayaan publik (Averus & Alfina, 2020), tetapi juga mendorong partisipasi luas dalam kebijakan publik, tetapi juga mendorong partisipasi luas dalam kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal dalam pemerintahan menjadi strategi penting untuk menciptakan tata kelola yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme yang difasilitasi negara. Menurut Wampler dan McNulty (2011), konsep ini menekankan

keterlibatan aktif warga dalam proses kebijakan publik agar keputusan yang dihasilkan membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Partisipasi ini dapat berbentuk konsultasi, musyawarah, hingga pengambilan keputusan langsung, yang melibatkan masyarakat sejak tahap perumusan hingga implementasi kebijakan guna menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tradisi yang berkembang di Kabupaten Ciamis, studi ini mengkaji tradisi *Mapag ramadhan* melalui perspektif *Participatory Governance* yang dikembangkan oleh Fung dan Wright (2003). Model ini menekankan *Empowered Participatory Governance* (EGP), dimana masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi *Mapag Ramadhan* menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, serta bagaimana pemerintah daerah mengakomodasi nilai-nilai budaya dalam kebijakan publik. Selain itu, studi ini akan menganalisis sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam tradisi ini dapat menjadi model bagi pengembangan tata kelola partisipatif di sektor lain, termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

METODE

Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif,

untuk memahami fenomena secara mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tradisi-tradisi *Mapag Ramadhan* dalam konteks *participatory governance* berdasarkan perspektif para pelaku dan pemangku kepentingan. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui diskusi dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, serta perwakilan pemerintah daerah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, artikel ilmiah, serta laporan yang relevan untuk memperkaya analisis. Kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan studi ini menggambarkan secara komprehensif keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan tradisi, serta bagaimana prinsip tata kelola partisipatif diterapkan dalam konteks budaya lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Mapag Ramadhan* seperti tradisi *Ngikis*, *Merlawu*, *Misalin*, *Nadhran*, dan istilah lainnya memiliki nilai spiritual, serta memiliki fungsi sebagai ajang pemererat hubungan sosial antar warga, memperkuat solidaritas, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi *Merlawu* misalnya, yang menjadi salah satu warisan budaya tak benda di Kabupaten Ciamis, yang dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Tradisi ini digelar di Situs Prabu Dimuntur, Desa Kertabumi Kecamatan

Cijeungjing, dan beberapa situs lainnya di Kabupaten Ciamis.

Merlawu melibatkan ziarah ke makam leluhur, dimana masyarakat membersihkan area makam, menabur bunga, dan memanjatkan doa (Berkah et al., 2022). Tradisi ini juga mencakup kegiatan *munggahan*, yaitu acara makan bersama dan saling bermaaf-maafan sebagai bentuk persiapan menyambut Ramadhan. Melalui tradisi ini, masyarakat tidak hanya menghormati leluhur, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan menjaga nilai-nilai gotong royong serta kebersamaan.

Selain *Merlawu*, ada juga tradisi *Ngikis* yang secara harfiah berarti “memagar”, dalam konteks tradisi ini berarti mengganti pagar bambu makam leluhur dengan pagar bambu yang baru (Hidayatloh, 2019). Tradisi *Ngikis* dilaksanakan di beberapa situs bersejarah, seperti Situs Gunung Padang, Situs Bojong Galuh Karangkamulyan, dan Situs Singaperbangsa III. Prosesi dimulai dengan napak tilas, pembacaan sejarah singkat, tabur bunga, dan penggantian pagar bambu. Prosesi ini sebagai simbol membersihkan diri dan menjaga perilaku serta hawa nafsu. Air yang digunakan dari tujuh mata air dari beberapa situs di Kabupaten Ciamis menjadi simbol pemersatu.

Tradisi di Kabupaten Ciamis melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh *kabuyutan*, agama, budayawan, pemerintah daerah, dan akademisi, serta menjadi agenda tahunan pemerintahan. Partisipasi luas ini

mencerminkan nilai gotong royong dalam tata kelola sosial. Modal sosial yang terbangun melalui tradisi lokal berperan penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Nilai seperti solidaritas dan kepercayaan antarwarga memperkuat kolaborasi masyarakat dengan pemerintah, mendorong keterlibatan aktif dalam musyawarah hingga pelaksanaan kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Modal sosial dalam tradisi lokal tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga mendukung tata kelola yang lebih inklusif dan responsif.

Fung dan Wright memperkenalkan konsep pemerintahan partisipatif (*Participative Governance*) sebagai suatu pemerintahan yang menempatkan masyarakat (non-pemerintah) sebagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan publik, yang selama ini cenderung didominasi oleh pemerintah (Fischer, 2018). Konsep ini menekankan hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat, tidak hanya melalui perwakilan seperti partai politik atau dewan perwakilan rakyat.

Partisipative governance merujuk pada model tata kelola di mana pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Hayashida-Carillo (2025), partisipasi dalam tata kelola menunjukkan bahwa model ini dapat meningkatkan keberlanjutan kegiatan di masyarakat melalui pengambilan keputusan yang

lebih inklusif dan representatif (Carillo & Harumi, 2015). Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program atau kebijakan yang dijalankan, tetapi juga memperkuat komitmen kolektif dalam menjaga dan mengembangkan kegiatan secara berkelanjutan.

Penerapan konsep tata kelola partisipatif menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan yang berdampak pada kehidupannya. Melalui mekanisme seperti musyawarah, deliberasi, pengawasan, dan aksi kolektif, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki suara dalam merumuskan solusi bersama. Dengan keterlibatan aktif ini, kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Di berbagai daerah, tata kelola partisipatif diwujudkan dalam berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, serta implementasi kebijakan. Pendekatan ini mencakup enam dimensi utama dalam tata kelola partisipatif (*participatory governance*) (McKay & Warren, 2018), yaitu *deliberasi* (diskusi dan pertukaran gagasan), *action* (keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan), *monitoring* (pengawasan dan evaluasi), *centralized coordination and power* (koordinasi antara pemerintah dan masyarakat), *school of democracy* (partisipasi sebagai sarana pembelajaran demokrasi), dan

outcomes (hasil nyata dari keterlibatan masyarakat).

Deliberasi menekankan pentingnya diskusi dan pertukaran gagasan. Deliberasi dalam *participatory governance* merujuk pada proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tradisi yang masih berkembang di Kabupaten Ciamis, deliberasi terjadi ketika masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan komunitas budaya berkumpul membahas pelaksanaan tradisi-tradisi. Forum-forum diskusi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, berbagi gagasan, menyepakati langkah-langkah terbaik, agar tradisi tetap terjaga dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang berkembang.

Dimensi *action* dalam tata kelola partisipatif mencerminkan keterlibatan langsung masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana warga tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menjalankan program atau kegiatan. Di Kabupaten Ciamis, keterlibatan ini terlihat dalam pelaksanaan berbagai tradisi lokal, yang bukan hanya sekedar perayaan budaya, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga warisan leluhur.

Menurut data dari Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ciamis (2024), lebih dari 70% kegiatan budaya di daerah didukung oleh inisiatif masyarakat, dengan kolaborasi antara tokoh adat, tokoh masyarakat,

pemuda dan pemerintah daerah. Studi dari Arnstein (1969) tentang *Ladder of Citizen Participation* juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan merupakan indikator penting dari tingkat partisipasi yang lebih substansial, dimana warga masyarakat memiliki kendali atas proses dan hasil yang terjadi (Samsir & Susanti, 2023). Partisipasi aktif dalam tradisi di Kabupaten Ciamis tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi model tata kelola berbasis masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah berkelanjutan.

Pemerintah dapat mengadopsi semangat keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan tradisi ke dalam program-program pembangunan lainnya, sesuai dengan dimensi *action* dalam *participatory governance*. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai program lain. Misalnya, program kebersihan lingkungan dapat melibatkan masyarakat melalui gotong royong yang terstruktur dengan dukungan fasilitas dari pemerintah. Begitu pula dalam pemberdayaan ekonomi, pemerintah dapat memfasilitasi kelompok usaha masyarakat dengan pendekatan yang sama seperti dalam pelestarian tradisi, yaitu dengan memberikan ruang partisipasi penuh dalam perencanaan dan eksekusi program.

Menurut Fung dan Wright (2003) dalam konsep *Empowered Participatory Governance*, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang

dibuat oleh pemerintah, tetapi juga sejauh mana masyarakat memiliki peran dalam implementasinya. Dengan meniru pola keterlibatan yang telah terbukti berhasil dalam kegiatan tradisional, pemerintah dapat menciptakan program yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

Dimensi ketiga yaitu *monitoring* dalam *participatory governance* mengacu pada peran masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan implementasi yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan publik. Partisipasi masyarakat dalam monitoring dapat berbentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa, pelaksanaan program pembangunan, hingga evaluasi efektivitas kebijakan daerah.

Di Kabupaten Ciamis, peran ini dapat dilihat dalam pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, dimana masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat sipil turut serta dalam memantau alokasi serta realisasi anggaran. Menurut laporan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2024), program *Transparansi Dana Desa* di beberapa daerah, termasuk Ciamis, berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa hingga 65%. Sehingga mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, dalam konteks budaya dan tradisi, masyarakat Ciamis juga aktif dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan

adat dan tradisi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contoh, kelompok tokoh adat, penggiat budaya dan masyarakat setempat berperan dalam memastikan kegiatan tradisi tidak hanya menjadi sekedar acara seremonial, tetapi juga mempertahankan esensi sosial dan spiritualnya. Hal ini sejalan dengan teori *Social Accountability* dari Fox (2015), yang menyatakan bahwa efektivitas *monitoring* bergantung pada keterlibatan masyarakat dan adanya mekanisme respon dari pemerintah (Siahaan et al., 2024). Sehingga dengan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan, baik dalam aspek pembangunan maupun pelestarian budaya, Kabupaten Ciamis dapat menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Dimensi *Centraled coordination and power* dalam *participatory governance* menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan tata kelola. Koordinasi ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Menurut Fung & Wright (2003), koordinasi yang terpusat namun inklusif merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola yang responsif dan akuntabel, sehingga kekuatan terpusat dapat menyerap aspirasi masyarakat dan mengintegrasikannya dalam setiap tahap perumusan serta implementasi kebijakan.

Koordinasi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Ciamis dapat dilihat dalam penyelenggaraan program desa wisata berbasis budaya. Seperti Desa Karangpaningal, yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku usaha dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal. Menurut data Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis (Ciamis.kab.go.id, 2024), keberhasilan program ini didukung oleh sinergi antara kebijakan daerah yang memberikan fasilitas dan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan promosi wisata.

Selain itu, koordinasi juga terlihat dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM, dimana pemerintah menyediakan pelatihan dan akses permodalan, sementara masyarakat berperan dalam inovasi produk dan pemasaran. Konsep ini sejalan dengan penelitian Ostrom (1990) tentang *Governing the Commons* (Kartodihardjo et al., 2019), yang menyatakan bahwa tata kelola yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dalam sistem koordinasi yang jelas untuk mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Dengan memperkuat koordinasi terpusat yang tetap membuka ruang partisipasi masyarakat, Kabupaten Ciamis dapat menciptakan tata kelola yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Dimensi *School of democracy* menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam tata kelola tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran demokrasi. Melalui keterlibatan aktif dalam musyawarah, perencanaan, dan pengawasan kebijakan, masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Praktik ini dapat terlihat dalam penyelegaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dimana warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan pembangunan lokal. Menurut laporan Bappeda Kabupaten Ciamis (2024), tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes mengalami peningkatan sebesar 30% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang lebih tinggi terhadap proses demokrasi di tingkat lokal.

Selain dalam konteks formal pemerintahan, *school of democracy* juga tercermin dalam pelestarian tradisi budaya, seperti *Mapag Ramadhan* dan *Seren Taun*, yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Tradisi ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjadi latihan bagi masyarakat dalam membangun konsensus, menyelesaikan konflik secara musyawarah, serta mengelola sumber daya secara kolektif. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Putnam (1993) dalam

Making Democracy Work, yang menekankan bahwa partisipasi dalam organisasi sosial dan budaya dapat meningkatkan *civic engagement* dan memperkuat praktik demokrasi (Muhayadi et al., 2024; Mujani, 2007). Dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola daerah, baik dalam konteks formal maupun tradisional, berperan penting dalam membangun budaya demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis.

Dimensi *outcomes* dalam *participatory governance* merujuk pada hasil nyata dari keterlibatan masyarakat dalam proses tata kelola. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, serta pengawasan program pemerintah berdampak pada efektivitas dan keberlanjutan kebijakan yang diterapkan.

Keberhasilan program *Desa Wisata Kertabumi* di Kabupaten Ciamis menjadi salah satu contoh nyata dari *outcomes* tata kelola partisipatif. Menurut data Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis (2024), sejak diluncurkannya program ini dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan, jumlah wisatawan meningkat sebesar 45% dalam dua tahun terakhir. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setempat (Nur Awalliyah et al., 2022).

Dalam konteks tata kelola sosial dan budaya, partisipasi masyarakat dalam pelestarian berbagai tradisi *Mapag Ramadhan*, *Seren Taun* dan *Hajat Bumi*

telah memperkuat identitas lokal serta meningkatkan solidaritas sosial. Berdasarkan laporan Balai Pelestarian Nilai Budaya (2023), keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya di Ciamis telah mendorong peningkatan partisipasi generasi muda sebesar 35%, menandakan keberlanjutan tradisi yang lebih terjamin. Konsep ini sejalan dengan temuan Fung dan Wright (2003) dalam *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tata kelola tidak hanya menciptakan kebijakan yang lebih responsif (Kurniasari, 2016), tetapi juga menghasilkan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, *outcomes* dari tata kelola partisipatif di Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi langsung pada kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Pemerintah daerah berperan dalam memberikan dukungan kebijakan, fasilitas, dan pengelolaan sumber daya. Sementara masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi keberlangsungan tradisi-tradisi tersebut. Melalui pola tata kelola yang partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ide dalam pengembangan tradisi agar tetap relevan dengan dinamika sosial.

Selain itu, keterbukaan pemerintah dalam mengakomodasi nilai-

nilai budaya lokal memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih efektif, sehingga tradisi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penguatan identitas daerah dan modal sosial dalam pembangunan. Dengan pendekatan ini, di Kabupaten Ciamis tidak hanya bertahan dari ancaman modernisasi, tetapi juga terus berkembang sebagai bagian dari sistem tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Tradisi *Mapag Ramadhan* dalam perspektif *participatory governance* menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat nilai budaya, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Tradisi ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pelestarian budaya, sejalan dengan prinsip *Empowered Participatory Governance* (EPG).

Koordinasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat tidak hanya mempertahankan identitas lokal, tetapi juga memperkuat modal sosial dan keberlanjutan tradisi. Oleh karena itu, model tata kelola partisipatif dalam tradisi ini dapat menjadi contoh kebijakan daerah yang lebih demokratis dan berbasis kearifan lokal.

Untuk memperkuat implementasi *participatory governance*, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Pemerintah perlu menyediakan regulasi dan dukungan

pendanaan, masyarakat harus aktif melibatkan generasi muda, sementara akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian dan strategi tata kelola berbasis data. Dengan kolaborasi ini, tradisi di masyarakat tidak hanya tetap lestari, tetapi juga menjadi model kebijakan budaya berbasis partisipasi di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127–138.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585–610.
- Berkah, H., Brata, Y. R., & Budiman, A. (2022). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Merlawu bagi Masyarakat Desa Kertabumi Kabupaten Ciamis. *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 3(1), 123–130.
- Carillo, H., & Harumi, A. (2015). *Leadership, Control Mechanisms and Networks for Sustainable Fishing*. <https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstreams/4fae5eb0-41cd-4a36-b921-0a055e017a29/download>
- Da Silva, C., Pereira, F., & Amorim, J. P. (2024). The integration of indigenous knowledge in school: A systematic review. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 54(7), 1210–1228. <https://doi.org/10.1080/03057925.2023.2184200>
- Dorongsihae, V., Sambiran, S., & Pangemanan, F. N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 2(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/41449>
- Fadli, M. R. (2020). Peran modal sosial dalam pendidikan sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 152–161.
- Fauzi, A. R., & Hasan, H. (2024). Sejarah Penyebaran Agama Islam di Wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. *PANALUNGTIK*, 7(1), 31–50.
- Fischer, F. (2018). Participatory governance and collaborative expertise. In *Handbook on Participatory Governance* (pp. 143–156). Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/downloadpdf/edcollchap/edcoll/9781785364341/9781785364341.00013.pdf>
- Hidayat, T. (2020). Kajian Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin: Cimaragas Kabupaten Ciamis. *Jurnal Metaedukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 17–22.

- Hidayatloh, S. (2019). Nilai-nilai kearifan lokal upacara adat Ngikis di situs Karangkamulyan kabupaten Ciamis. *Patanjala*, 11(1), 97–113.
- Jessen, T. D., Ban, N. C., Claxton, N. X., & Darimont, C. T. (2022). Contributions of Indigenous Knowledge to ecological and evolutionary understanding. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 20(2), 93–101. <https://doi.org/10.1002/fee.2435>
- Kartodihardjo, H., Ariati, N., & Abdullah, M. (2019). Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2–2), 33–47.
- Kurniasari, W. (2016). Analisis implementasi reformasi birokrasi dalam merealisasikan good governance dan pencapaian target millenium development goals (studi kasus pada pemerintah kota yogyakarta). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 67–78.
- McKay, S., & Warren, M. E. (2018). Democratizing participatory governance through countervailing power. In *Handbook on Participatory Governance* (pp. 77–93). Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/downloadpdf/edcollchap/edcoll/9781785364341/9781785364341.00010.pdf>
- Muhayadi, A. R. N., Rahmawati, B. S., Rahim, K., Isnaeni, I., & Wijayanti, I. (2024). Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Di Wisata Gunung Jae, Desa Sedau Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. *Student Research Journal*, 2(4), 78–87.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mMKxsD7xAHgC&oi=fnd&pg=PA4&dq=konsep+yang+dikemukakan+oleh+Putnam+\(1993\)+dalam+Making+Democracy+Work,+yang+menekankan+bahwa+partisipasi+dalam+organisasi+sosial+dan+budaya&ots=mXKg1qX2ls&sig=873us8FC1WkM-ePt3Uo5za_EqPo](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mMKxsD7xAHgC&oi=fnd&pg=PA4&dq=konsep+yang+dikemukakan+oleh+Putnam+(1993)+dalam+Making+Democracy+Work,+yang+menekankan+bahwa+partisipasi+dalam+organisasi+sosial+dan+budaya&ots=mXKg1qX2ls&sig=873us8FC1WkM-ePt3Uo5za_EqPo)
- Nur Awalliyah, F., Sihabudin, A. A., & Yuliani, D. (2022). *Implementasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Ciamis*.
- Samsir, A. N., & Susanti, G. (2023). Dinamika keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah lokal: Studi kasus program pengelolaan perikanan budidaya di kabupaten pangkep. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 63–78.

- Shanti, D. R., Retnaningtiyas, W., Sa'adah, I. N., Boedi, O. B., & Sari, R. G. (2022). Etnis Tionghoa di Kabupaten Ciamis: Diaspora dan Dinamika Permukimannya pada Abad ke-19 Hingga Pertengahan Abad ke-20. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 11(1), 46–65.
- Siahaan, A. L. S., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2024). E-GOVERNMENT DAN AKUNTABILITAS SOSIAL Studi Kasus Website “Laporgub!” *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 35–47.
- Sofianto, K., & Falah, M. (2020). Arti Penting Situs Astana Gede di Kabupaten Ciamis bagi Masyarakat Jawa Barat. *Mimbar Pendidikan*, 5(1), 15–36.
- Suryani, Y., & Fahmi, R. F. M. (2021). Tradisi Misalin, Situs Bojong Salawe Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 2(1), 60–82.
- Syafar, M. (2017). Modal sosial komunitas dalam pembangunan sosial. *Lembaran Masyarakat*, 3(1), 1–22.
- Widodo, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dalam Menumbuhkan Demokrasi di Kebumen. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 6(1), 88–98.
- Wijayanti, Y., & Wulan, A. (2019). Tradisi Nyepuh Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 2(2), 181–194.